



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 63/SEK/OT.01.2/02/2017

Jakarta, 20 Februari 2017

Lampiran : Satu berkas

Hal : Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Kepada :

1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
7. Plt. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia RI Nomor B/01/M.RB.06/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17/SEK/OT.01.2/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan sehubungan dengan tenggat waktu penyampaian hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada akhir bulan April 2017, maka diminta agar:

1. Semua unit Eselon I, segera membentuk Tim Reformasi Birokrasi (RB) di masing-masing unit kerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pejabat Eselon 1 dan memberikan SK Tim RB kepada Ketua Tim Sekretariat RB Mahkamah Agung (*hard copy* dan *soft copy*) melalui email **jeannyhutauruk@ditjenmiltun.net** dan **huzafah2009@gmail.com**. SK tersebut akan dipergunakan untuk menyempurnakan SK Tim RB Mahkamah Agung tahun 2017.
(Tim RB yang sudah mengirimkan yaitu Ditjen Badilum dan Ditjen Badilmiltun)
2. Semua unit Eselon I, segera mengirimkan *evidence* RB untuk 8 Area, berupa *hard copy* dan *soft copy* kepada alamat email di atas. (yang sudah mengirimkan *evidence* yaitu Kepaniteraan dan Ditjen Badilmiltun)
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar menginstruksikan ke seluruh satuan kerja di bawahnya untuk membentuk Tim RB di masing-masing pengadilan dan mengirimkan *soft copy* Tim RB serta *evidence* ke 8 area, kepada Tim RB yang ada di unit Eselon I masing-masing. Unit Eselon I akan meneruskan ke Tim Sekretariat RB Mahkamah Agung, pada alamat email di atas.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

Nomor : B/ **01** /M.RB.06/2017
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur
dan Pengawasan

19 Januari 2017

Yang Terhormat:

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 81 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019, kami mengingatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan kinerja tahun 2016:
 - a. Laporan Kinerja tahun 2016 untuk kementerian/lembaga paling lambat kami terima pada tanggal 28 Februari 2017. Laporan kinerja ini selanjutnya akan kami gunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat setelah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang merupakan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
 - b. Laporan Kinerja tahun 2016 untuk pemerintah daerah paling lambat kami terima pada tanggal 31 Maret 2017; dan
 - c. Penyusunan laporan kinerja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014.

2. Penyampaian PMPRB *online*:
 - a. Kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi untuk segera melakukan penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2016 secara mandiri (PMPRB) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tersebut di atas, dan menyampaikan hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara *online* kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional paling lambat pada akhir bulan April 2017;
 - b. Kementerian/lembaga dengan *nomenklatur* baru akan diberikan kode akun dan *password* baru sebagai pelaksanaan penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara *online*; dan
 - c. Kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota agar menerapkan PMPRB secara *online*, dan menyampaikan/melaporkan hasil PMPRB, untuk periode sampai dengan Tahun Anggaran 2016, paling lambat April 2017.
3. Terkait pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), agar disampaikan unit yang sudah dipersiapkan Tim Penilai Internal. Penentuan unit adalah yang terbaik dan mempresentasikan layanan utama kementerian/lembaga. Untuk pemerintah daerah agar diusulkan unit pelayanan terpadu dan atau unit yang terkait dengan perijinan.

Selanjutnya dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari surat edaran ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian Saudara, disampaikan ucapan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:

Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 17/SEK/OT.01.2/01/2017
Hal : Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi
atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Jakarta, 11 Januari 2017

Yth. 1. Panitera
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
5. Kepala Badan Urusan Administrasi
6. Kepala Badan Pengawasan
7. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil
di -
Tempat

Sehubungan dengan Tahun Anggaran yang baru dan untuk mempersiapkan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang sudah dekat, maka diingatkan untuk para pejabat Eselon I, agar:

1. Membentuk Tim PMPRB pada setiap Unit Eselon I yang Saudara pimpin, untuk 8 (delapan) Area Perubahan dengan Penanggung Jawab Eselon II, dan menyiapkan *Evidence* per masing-masing Area dalam bentuk *Soft Copy*.
2. Mengirim nama-nama Struktural Eselon III untuk mengganti nama-nama yang kosong pada Surat Keputusan Tim PMPRB yang lama karena adanya mutasi/promosi keluar kota dan untuk pengganti nama yang lama, bilamana perlu.
3. Melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (PK) untuk tahun 2017.
4. Melaksanakan evaluasi seluruh SOP yang ada pada unit Eselon I dan pada 4 (empat) Badan Peradilan.
5. Mengumpulkan Realisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk tahun 2016 dan mempersiapkan Target SKP untuk tahun 2017.
6. Menginformasikan kepada 4 (empat) Badan Peradilan (khusus untuk para Dirjen) agar membentuk Tim Kecil RB di Pengadilan masing-masing dan menyiapkan *Evidence* 8 (delapan) Area Perubahan, dalam bentuk *Soft Copy*.

Untuk Nomor 1, 2 dan 5 agar segera di email ke Ketua Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, yaitu: jeannyhutaaruk@ditjenmiltun.net.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Dr. Drs. Aco Nur, M.H.
NIP. 19630313 198903 1 021

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI